

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 43 Tahun 2021

Nomor 43

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 43 Tahun 2021

Tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,



SETIAWAN WANGSAATMAJA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan/atau izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.
8. Kendaraan Bermotor *Hybrid* adalah kendaraan yang memiliki fungsi mematikan mesin secara otomatis saat berhenti sejenak (*idling stop*), penggereman regeneratif , alat bantu gerak berupa motor listrik dan mampu digerakan sepenuhnya oleh motor listrik untuk waktu atau kecepatan tertentu.
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
10. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

11. Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
16. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
17. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
18. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PKB dan BBNKB dikenakan pada kelompok Kendaraan Bermotor, yaitu:
 - a. Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air;
 - b. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
 - c. KBL Berbasis Baterai;
 - d. Kendaraan Bermotor *Hybrid*;
 - e. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk;

- f. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin;
 - g. Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi; dan
 - h. Kendaraan Bermotor lainnya.
- (2) Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mobil penumpang, terdiri atas sedan, *jeep*, minibus, dan mobil penumpang roda tiga;
 - b. mobil bus, terdiri atas *microbus* dan *bus*;
 - c. mobil barang, terdiri atas *pick up*, *light truck*, *truck*, *truck tronton*, *double cabin*, *blind van*, mobil barang roda tiga, dan mobil barang jenis lainnya;
 - d. sepeda motor roda dua dan roda tiga; dan
 - e. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Selain yang Dioperasikan di Air

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a. NJKB; dan
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditentukan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun berkenaan atau pada tahun berjalan untuk kendaraan bermotor yang belum ditetapkan.
- (2) Penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.

Pasal 5

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor, serta diberi nilai 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. mobil penumpang roda 3 nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - c. mobil barang roda 3 nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - d. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua lima);
 - e. *jeep* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima nol);
 - f. minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima nol);
 - g. *pick up* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
 - h. *blind van* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
 - i. *double cabin* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
 - j. *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
 - k. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - l. *light truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
 - m. *truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - n. *truck tronton* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 6

NJKB untuk Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air, tercantum dalam Lampiran Huruf A sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pengenaan PKB dan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 8

Tarif BBNKB untuk Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air di Daerah Provinsi, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri;
- b. untuk BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan angkutan umum;
- c. untuk BBNKB pertama sebesar 15% (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder 250 cc atau lebih;
- d. untuk BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder di bawah 250 cc;
- e. untuk BBNKB pertama sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor listrik roda 4 (empat) atau lebih;
- f. untuk BBNKB pertama sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk kendaraan bermotor listrik roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga); dan
- g. untuk BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor listrik jenis *hybrid*.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum

Paragraf 1

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang;

- b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang; dan
 - c. memiliki izin trayek dan/atau tidak dalam trayek angkutan umum orang.
- (4) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan PKB dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, dengan tarif untuk PKB sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.

Paragraf 2

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang

Pasal 10

- (1) PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang dikenakan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (2) BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang dikenakan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang; dan
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang.
- (4) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan PKB dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) dari PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, serta tarif dengan ketentuan:
 - a. sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak, untuk PKB;
 - b. sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB, untuk BBNKB pertama; dan
 - c. sebesar 1% (satu persen) dari NJKB, untuk BBNKB kedua dan seterusnya.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Listrik dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Paragraf 1

Kendaraan Bermotor Listrik

Pasal 11

- (1) PKB untuk Kendaraan Bermotor Listrik angkutan orang pribadi dan angkutan barang pribadi dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Listrik angkutan orang pribadi dan angkutan barang pribadi dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 2

Kendaraan Bermotor Listrik Umum Berbasis Baterai

Pasal 12

- (1) PKB untuk KBL Berbasis Baterai angkutan umum orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai angkutan umum orang dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai angkutan umum barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (4) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai angkutan umum barang dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dihitung berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Huruf B, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lampiran NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ubah bentuk pada saat penetapan.

Bagian Keenam
Kendaraan Bermotor Ganti Mesin
Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, dihitung sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Penghitungan tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu sebesar 12,5% (dua belas koma lima per sen) dari nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bagian Ketujuh
Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi
Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari Kendaraan Bermotor pribadi atau bukan umum menjadi Kendaraan Bermotor Umum, yaitu:
 - a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB Kendaraan Bermotor Umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari Kendaraan Bermotor Umum menjadi Kendaraan Bermotor pribadi atau bukan umum, yaitu:
 - a. dasar pengenaan PKB, dihitung menggunakan tarif sesuai dengan kendaraan bukan umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pasal 16

Perubahan fungsi Kendaraan Bermotor bukan umum menjadi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum serta izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 17

(1) Dalam hal NJKB untuk jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:

a. untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru:

1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kosong (*off the road*);
2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan tarif ppn, tarif BBNKB penyerahan pertama dan tarif PKB dari harga isi (*on the road*);
3. NJKB dari daerah provinsi lain;
4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
5. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

b. untuk kendaraan bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan:

1. HPU;
2. NJKB dari daerah provinsi lain;
3. harga yang tercantum dalam faktur; atau
4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

(2) Dalam hal NJKB untuk jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini tetapi masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:

a. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan:

1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. Kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual -tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan:
1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; atau
 4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- c. untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1985 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1985.
- (3) Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kepada Kepala Badan, dengan melampirkan faktur dan keterangan/bukti lainnya.
- (4) NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

Penetapan besaran PKB dan BBNKB dilakukan pembulatan keatas dalam ratusan rupiah, perhitungan Rp1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp99,00 (sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp100,00 (seratus rupiah).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

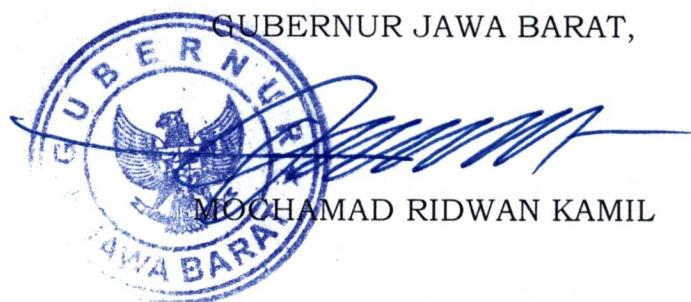
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2021



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2021



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 43 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 JULI 2021

TENTANG : PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR

A. NJKB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SELAIN YANG DIOPERASIKAN DI AIR

NO	KODE NJKB	MERK	TYPE	TAHUN	NJKB	BOBOT	DP PKB
JENIS KE 001 : (A01) SEDAN							
1	A01002001	ACADIAN	INVANDER	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
2	A01009001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2000	71.000.000	1,025	72.775.000
3	A01009001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2001	78.000.000	1,025	79.950.000
4	A01009001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2002	83.000.000	1,025	85.075.000
5	A01009001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2003	85.000.000	1,025	87.125.000
6	A01009001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2004	96.000.000	1,025	98.400.000
7	A01009002	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	74.000.000	1,025	75.850.000
8	A01009003	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	111.000.000	1,025	113.775.000
9	A01009003	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2002	120.000.000	1,025	123.000.000
10	A01009003	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2003	123.000.000	1,025	126.075.000
11	A01009003	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2004	137.000.000	1,025	140.425.000
12	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	72.000.000	1,025	73.800.000
13	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2001	83.000.000	1,025	85.075.000
14	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2002	90.000.000	1,025	92.250.000
15	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2003	110.000.000	1,025	112.750.000
16	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2004	126.000.000	1,025	129.150.000
17	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2005	144.000.000	1,025	147.600.000
18	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2006	159.000.000	1,025	162.975.000
19	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2007	177.000.000	1,025	181.425.000
20	A01009005	ALFA ROMEO	A156 2.5 O-SYSTEM	2005	125.000.000	1,025	128.125.000
21	A01009006	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2003	88.000.000	1,025	90.200.000
22	A01009006	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2004	100.000.000	1,025	102.500.000
23	A01009007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2002	88.000.000	1,025	90.200.000
24	A01009007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2003	97.000.000	1,025	99.425.000
25	A01009007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2004	115.000.000	1,025	117.875.000
26	A01009007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2005	146.000.000	1,025	149.650.000
27	A01009007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2006	164.000.000	1,025	168.100.000
28	A01009007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2007	199.000.000	1,025	203.975.000
29	A01009008	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
30	A01009009	ALFA ROMEO	ALFA SUD 1.186 CC	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
31	A01009010	ALFA ROMEO	ALFETTA	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
32	A01009011	ALFA ROMEO	AR 1779cc	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
33	A01009012	ALFA ROMEO	CELOCE	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
34	A01009013	ALFA ROMEO	CT VELOCE BERLINA	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
35	A01009014	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.3	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
36	A01009015	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
37	A01009016	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.3	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
38	A01009017	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.6	1985	51.000.000	1,025	52.275.000
39	A01009018	ALFA ROMEO	MONTREAL	1985	49.000.000	1,025	50.225.000
40	A01009019	ALFA ROMEO	SPIDER 3.195cc	2010	665.000.000	1,025	681.625.000
41	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2000	69.000.000	1,025	70.725.000
42	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2001	74.000.000	1,025	75.850.000
43	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2002	88.000.000	1,025	90.200.000
44	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2003	97.000.000	1,025	99.425.000
45	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2004	115.000.000	1,025	117.875.000
46	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2005	146.000.000	1,025	149.650.000
47	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2006	164.000.000	1,025	168.100.000
48	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2007	199.000.000	1,025	203.975.000
49	A01021001	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2002	611.000.000	1,025	626.275.000
50	A01021001	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2003	657.000.000	1,025	673.425.000
51	A01021002	ASTON MARTIN	DB9	2007	1.124.000.000	1,025	1.152.100.000
52	A01021003	ASTON MARTIN	DB9 VOLANTE MT	2005	590.000.000	1,025	604.750.000
53	A01021004	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2018	3.149.000.000	1,025	3.227.725.000
54	A01021004	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2019	3.150.000.000	1,025	3.228.750.000
55	A01021004	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2020	3.158.000.000	1,025	3.236.950.000
56	A01021004	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2021	3.474.000.000	1,025	3.560.850.000
57	A01021005	ASTON MARTIN	VANQUISH V12	2005	1.313.000.000	1,025	1.345.825.000
58	A01021006	ASTON MARTIN	VANTAGE	2010	1.991.000.000	1,025	2.040.775.000
59	A01021006	ASTON MARTIN	VANTAGE	2018	2.150.000.000	1,025	2.203.750.000

NO	TAHUN	BUS	BAK TRUCK TERBUKA	BESTELWAGON/ DELVAN/BOX/CARGO / LANDASAN/ TERBANG/SELF LOADER/BERTINGKAT /REFRIGERATOR/WIN G BOX/	TANGKI/ DAMKAR	BAK TRONTON/ TANDUM/ KEMUDI KEMBAR	DUMP TRUCK/ARMROL L/LAD BAK/LOAD BAK/COMPACTO R/TRUCK SAMPAH	MIXER	FLAT DECK	FREEZER	DEREK	SWEeper	TANGGA HYDROlic	VACUM	CRANE/SKY LIFT/ SEMI TRAILER/ CONCRETE PUMP	LODGING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER/ PRIMEMOVER	CONVEYOR BELT	RIVER CONTAINER	KERETA GANDENGAN/ TEMPEL	REFRIGERATOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.5	TRUCK TRONTON																						
	1985	38,000,000		10,000,000	42,000,000	28,000,000	18,000,000	42,000,000	10,000,000	10,000,000	26,000,000	52,000,000	26,000,000	52,000,000	26,000,000	52,000,000	17,000,000	57,000,000	90,000,000	94,000,000	28,000,000	44,000,000	
	1986	40,000,000		12,000,000	44,000,000	30,000,000	20,000,000	44,000,000	12,000,000	12,000,000	28,000,000	54,000,000	28,000,000	54,000,000	28,000,000	54,000,000	19,000,000	59,000,000	90,000,000	96,000,000	30,000,000	46,000,000	
	1987	40,000,000		12,000,000	44,000,000	30,000,000	20,000,000	44,000,000	12,000,000	12,000,000	28,000,000	54,000,000	28,000,000	54,000,000	28,000,000	54,000,000	19,000,000	59,000,000	90,000,000	96,000,000	30,000,000	46,000,000	
	1988	40,000,000		12,000,000	44,000,000	30,000,000	20,000,000	44,000,000	12,000,000	12,000,000	28,000,000	54,000,000	28,000,000	54,000,000	28,000,000	54,000,000	19,000,000	59,000,000	90,000,000	96,000,000	30,000,000	46,000,000	
	1989	40,000,000		12,000,000	44,000,000	30,000,000	20,000,000	44,000,000	12,000,000	12,000,000	28,000,000	54,000,000	28,000,000	54,000,000	28,000,000	54,000,000	19,000,000	59,000,000	90,000,000	96,000,000	30,000,000	46,000,000	
	1990	40,000,000		12,000,000	44,000,000	30,000,000	20,000,000	44,000,000	12,000,000	12,000,000	28,000,000	54,000,000	28,000,000	54,000,000	28,000,000	54,000,000	21,000,000	61,000,000	90,000,000	98,000,000	32,000,000	48,000,000	
	1991	42,000,000		14,000,000	46,000,000	32,000,000	22,000,000	46,000,000	14,000,000	14,000,000	30,000,000	56,000,000	30,000,000	56,000,000	30,000,000	56,000,000	21,000,000	61,000,000	90,000,000	98,000,000	32,000,000	48,000,000	
	1992	42,000,000		14,000,000	46,000,000	32,000,000	22,000,000	46,000,000	14,000,000	14,000,000	30,000,000	56,000,000	30,000,000	56,000,000	30,000,000	56,000,000	21,000,000	61,000,000	90,000,000	98,000,000	32,000,000	48,000,000	
	1993	42,000,000		14,000,000	46,000,000	32,000,000	22,000,000	46,000,000	14,000,000	14,000,000	30,000,000	56,000,000	30,000,000	56,000,000	30,000,000	56,000,000	21,000,000	61,000,000	90,000,000	98,000,000	32,000,000	48,000,000	
	1994	42,000,000		14,000,000	46,000,000	32,000,000	22,000,000	46,000,000	14,000,000	14,000,000	30,000,000	56,000,000	30,000,000	56,000,000	30,000,000	56,000,000	21,000,000	61,000,000	90,000,000	98,000,000	32,000,000	48,000,000	
	1995	42,000,000		14,000,000	46,000,000	32,000,000	22,000,000	46,000,000	14,000,000	14,000,000	30,000,000	56,000,000	30,000,000	56,000,000	30,000,000	56,000,000	21,000,000	61,000,000	90,000,000	98,000,000	32,000,000	48,000,000	
	1996	44,000,000		16,000,000	48,000,000	34,000,000	24,000,000	48,000,000	16,000,000	16,000,000	32,000,000	48,000,000	32,000,000	48,000,000	32,000,000	58,000,000	23,000,000	63,000,000	90,000,000	100,000,000	34,000,000	50,000,000	
	1997	44,000,000		16,000,000	48,000,000	34,000,000	24,000,000	48,000,000	16,000,000	16,000,000	32,000,000	48,000,000	32,000,000	48,000,000	32,000,000	58,000,000	23,000,000	63,000,000	90,000,000	100,000,000	34,000,000	50,000,000	
	1998	44,000,000		16,000,000	48,000,000	34,000,000	24,000,000	48,000,000	16,000,000	16,000,000	32,000,000	48,000,000	32,000,000	48,000,000	32,000,000	58,000,000	23,000,000	63,000,000	90,000,000	100,000,000	34,000,000	50,000,000	
	1999	44,000,000		16,000,000	48,000,000	34,000,000	24,000,000	48,000,000	16,000,000	16,000,000	32,000,000	48,000,000	32,000,000	48,000,000	32,000,000	58,000,000	23,000,000	63,000,000	90,000,000	100,000,000	34,000,000	50,000,000	
	2000	44,000,000		16,000,000	48,000,000	34,000,000	24,000,000	48,000,000	16,000,000	16,000,000	32,000,000	48,000,000	32,000,000	48,000,000	32,000,000	58,000,000	23,000,000	63,000,000	90,000,000	100,000,000	34,000,000	50,000,000	
	2001	46,000,000		18,000,000	50,000,000	36,000,000	26,000,000	50,000,000	18,000,000	18,000,000	34,000,000	50,000,000	34,000,000	50,000,000	34,000,000	60,000,000	25,000,000	65,000,000	90,000,000	102,000,000	36,000,000	52,000,000	
	2002	46,000,000		18,000,000	50,000,000	36,000,000	26,000,000	50,000,000	18,000,000	18,000,000	34,000,000	50,000,000	34,000,000	50,000,000	34,000,000	60,000,000	25,000,000	65,000,000	90,000,000	102,000,000	36,000,000	52,000,000	
	2003	46,000,000		18,000,000	50,000,000	36,000,000	26,000,000	50,000,000	18,000,000	18,000,000	34,000,000	50,000,000	34,000,000	50,000,000	34,000,000	60,000,000	25,000,000	65,000,000	90,000,000	102,000,000	36,000,000	52,000,000	
	2004	46,000,000		18,000,000	50,000,000	36,000,000	26,000,000	50,000,000	18,000,000	18,000,000	34,000,000	50,000,000	34,000,000	50,000,000	34,000,000	60,000,000	25,000,000	65,000,000	90,000,000	102,000,000	36,000,000	52,000,000	
	2005	46,000,000		18,000,000	50,000,000	36,000,000	26,000,000	50,000,000	18,000,000	18,000,000	34,000,000	50,000,000	34,000,000	50,000,000	34,000,000	60,000,000	25,000,000	65,000,000	90,000,000	102,000,000	36,000,000	52,000,000	
	2006	48,000,000		20,000,000	52,000,000	38,000,000	28,000,000	52,000,000	20,000,000	20,000,000	36,000,000	52,000,000	36,000,000	52,000,000	36,000,000	62,000,000	27,000,000	67,000,000	90,000,000	103,000,000	38,000,000	54,000,000	
	2007	50,000,000		22,000,000	54,000,000	40,000,000	30,000,000	54,000,000	22,000,000	38,000,000	54,000,000	38,000,000	54,000,000	38,000,000	64,000,000	29,000,000	69,000,000	90,000,000	104,000,000	40,000,000	56,000,000		
	2008	52,000,000		24,000,000	56,000,000	42,000,000	32,000,000	56,000,000	24,000,000	40,000,000	56,000,000	40,000,000	56,000,000	40,000,000	64,000,000	31,000,000	71,000,000	90,000,000	105,000,000	42,000,000	58,000,000		
	2009	55,000,000		25,000,000	58,000,000	43,000,000	33,000,000	58,000,000	25,000,000	42,000,000	58,000,000	41,000,000	58,000,000	41,000,000	67,000,000	32,000,000	72,000,000	90,000,000	106,000,000	43,000,000	60,000,000		
	2010	60,000,000		26,000,000	60,000,000	44,000,000	34,000,000	60,000,000	26,000,000	43,000,000	60,000,000	42,000,000	60,000,000	42,000,000	68,000,000	33,000,000	73,000,000	90,000,000	108,000,000	44,000,000	62,000,000		
	2011	65,000,000		27,000,000	62,000,000	45,000,000	35,000,000	62,000,000	27,000,000	44,000,000	62,000,000	43,000,000	62,000,000	43,000,000	69,000,000	34,000,000	74,000,000	90,000,000	110,000,000	45,000,000	64,000,000		
	2012	71,000,000		28,000,000	64,000,000	46,000,000	36,000,000	64,000,000	28,000,000	45,000,000	64,000,000	44,000,000	64,000,000	44,000,000	70,000,000	35,000,000	75,000,000	90,000,000	112,000,000	46,000,000	66,000,000		
	2013	72,000,000		29,000,000	66,000,000	47,000,000	37,000,000	66,000,000	29,000,000	46,000,000	66,000,000	45,000,000	66,000,000	45,000,000	71,000,000	36,000,000	76,000,000	90,000,000	114,000,000	47,000,000	68,000,000		
	2014	73,000,000		30,000,000	68,000,000	48,000,000	38,000,000	68,000,000	30,000,000	47,000,000	68,000,000	46,000,000	68,000,000	46,000,000	72,000,000	37							